



Wisatawan & Pendatang Diperiksa Acak

JOGJA-Pemda DIY akan memeriksa secara acak wisatawan atau pendatang yang ke DIY saat libur akhir pekan yang bertepatan Imlek, Jumat (12/2).

Lugas Subarkah, Sirajul Khafid, & Jumali
redaksi@Harianjogja.com

Sebanyak tiga titik pemeriksaan akan didirikan di perbatasan DIY untuk memeriksa secara acak pengendara. Petugas akan memastikan pengendara memiliki surat hasil *rapid test* antigen negatif Covid-19. "Pemeriksaan secara acak untuk sampel," kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Jogja, Selasa (9/2).



Menurut Sultan pemeriksaan dilakukan untuk menekan laju kasus baru Covid-19 di DIY. "Ya kalau memang dia [pendatang] positif [Covid-19] ya kalau saya ya tidak boleh masuk [DIY]. Karena nanti hanya akan menimbulkan masalah baru," kata ayah lima putri ini.

► Halaman 10

Pemeriksaan dilakukan untuk menekan laju kasus baru Covid-19 di DIY.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyatakan dari sekitar 7.000 RT di Sleman belum ditemukan RT yang masuk dalam zona merah.

Wisatawan & Pendatang...

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menjelaskan pengambilan sampel secara acak bagi pendatang merupakan implementasi Surat Edaran (SE) No.7/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19. Baskara Aji menambahkan tidak semua pengendara dicegat dan diminta menunjukkan surat hasil *rapid test* antigen di perbatasan. "Bukan pencegahan pengendara karena nanti macet dan jumlah SDM belum memadai. Jadi sporadis saja sifatnya dan mulai dilakukan Kamis sore [11/2] atau Jumat besok [12/2]," ujar mantan Kepala Disdikpora DIY itu.

Namun, lanjutnya, jika ada pendatang yang kedapatan tidak mengantongi surat hasil tes *rapid test* antigen Pemda DIY tidak menyediakan *rapid test* antigen gratis di lokasi. Pendatang harus melakukan tes sendiri di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. "Jadi silakan tes di tempat terdekat, dan kalau tidak bawa [surat bebas Covid-19] silakan balik [putar arah]," ujarnya.

Kegiatan itu, kata Aji, akan fokus saat libur panjang berlangsung. Pasalnya untuk PTKM mikro Pemda DIY lebih fokus kepada pengawasan mobilitas masyarakat di tingkat RT, RW, padukuhun hingga kalurahan.

Pt Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengatakan akan ada tiga titik pemeriksaan di perbatasan DIY. Terkait dengan pelaksanaannya, Dishub akan berkoordinasi dengan lintas sektoral bahkan jika perlu berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah.

"Jadi di Prambanan, terus Jalan Magelang Sleman, terus Wates, Kulonprogo. Kami akan melibatkan semua orang karena kami ini tidak punya kewenangan memberhentikan kendaraan. Jadi mungkin akan berkoordinasi pihak terkait, seperti polisi hingga Satpol PP," katanya.

PTKM Mikro

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyatakan dari sekitar 7.000 RT di Sleman belum ditemukan RT yang masuk dalam zona merah. "Dengan kriteria sesuai Imendagri No.3/2021 tidak ada RT di Sleman masuk zona merah. Mayoritas kuning

dan hijau, hanya sangat sedikit yang orange," kata Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo, Selasa.

Hanya saja, lanjut Joko, data epidemiologi tersebut masih terus diselesaikan karena pendataan terus berjalan. Dinkes masih menelusuri kasus positif yang terjadi dalam tujuh hari terakhir di tingkatan RT. Padahal jumlah RT se-Sleman ada lebih dari 7.000 RT. Jadi ditemukan di dalam rumah yang positif beberapa orang maka tetap dihitung satu rumah. Sayangnya, kata Joko, tidak semua kasus positif alamatnya lengkap sampai tingkat RT. "Data sementara kami masih belum menemukan adanya RT yang masuk zona merah. Tapi [data ini] masih belum tuntas, kami masih mengecek seluruh kalurahan. Mudah-mudahan besok [hari ini] pendataan selesai," kata Joko.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan penanganan PPKM mikro di tingkat RT/RW ditopang oleh kalurahan. Satgas di tingkat padukuhun menjadi pusat untuk koordinasi antar RT/RW. "Koordinasi dilakukan untuk menyuplai kebutuhan warga yang menjalani karantina. Kebutuhan dananya

dari dana desa. Untuk proses pengobatan tetap ditanggung oleh Pemkab," katanya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menyatakan posko yang ada di kampung akan semakin diaktifkan lagi. Heroe menyatakan saat ini sedang membahas penanganan di tingkat RT berdasarkan zona. Saat ini ada lima kelurahan di Kota Jogja yang masuk zona merah. Namun status zona merah kelurahan belum tentu selaras dengan zona di seluruh tingkat RT.

Di Bantul, kebijakan (PTKM) mikro belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kelurahan Timbulharjo, Bantul, Sawahi mengaku baru mendapatkan instruksi Bupati Bantul Selasa. Selain itu, dirinya juga belum mengetahui secara jelas terkait dengan kriteria zona hijau, kuning, orange dan merah. "Untuk penetapan zonasi dan teknis nanti seperti apa? Kami belum mengetahui. Surat baru kami terima. Dan sampai kini, belum ada wilayah kami yang menerapkan *lockdown*," ucap Sawahi.

Persaan belum adanya *lockdown* wilayah juga diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul Ani Widayanti. "Belum ada. Sejatinya sebelum ada kebijakan PTKM mikro, sejatinya kami di kelurahan Sumbermulyo telah menerapkan kebijakan untuk membentuk tim satgas di tingkat dusun," ujar Ani.

Vaksinasi Lansia

Adapun untuk program vaksinasi, tenaga kesehatan (nakes) lansia di Kota Jogja mulai diinjeksi vaksin Sinovac. RS Panti Rapih menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memberikan vaksinasi bagi tenaga kesehatan lansia.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menjelaskan pada Februari ini vaksinasi masih menyasar nakes yang sebelumnya kriterianya berusia 18-59 tahun. Hanya, kini bagi nakes di atas usia 60 tahun bisa divaksinasi. "Maret itu baru mereka yang di atas 60 tahun, lansia untuk umum, dan pelayan publik," kata dia saat menyambangi langsung proses vaksinasi pada nakes lansia di RS Panti Rapih, Selasa.

Total nakes lansia di RS Panti Rapih mencapai 63 orang. Selain itu, sebanyak tujuh nakes lansia di RSUD Wiroso juga divaksinasi. Perbedaan vaksinasi lansia dan non-lansia terletak pada masa injeksi kedua setelah injeksi pertama. "Kalau yang umum 14 hari, kalau usia lanjut vaksinasi keduanya 28 hari," jelasnya.

Heroe menyebutkan proses vaksinasi di Kota Jogja terhitting cepat. Dari target vaksinasi nakes yang diproyeksikan selesai April, Heroe optimis kelar Februari akhir. "Insyaallah Februari bisa selesai semua untuk nakes, di samping nakes lansia yang harus menunggu 28 hari," ujarnya.

Direktur Utama RS Panti Rapih, Triputro Nugroho menjadi salah satu nakes lansia yang divaksin. Usianya yang menjelang 63 tahun baru bisa mengikuti vaksin setelah dikeluarkannya izin dari BPOM. "Saya nakes di sini, saya mencoba daftar [sebelumnya], tapi ditolak dari sistem. Kemudian setelah ada kesempatan ini di RS Panti Rapih ada 63 orang dokter di atas 60 tahun [divaksin]," ujarnya.

Sebagai lansia, Triputro tidak

merasakan efek setelah menjalani vaksinasi. "Enggak ada apa-apa, enggak ada rasa sakit atau apa. Dibilang *ngantuk*, saya juga enggak *ngantuk*. Ini yang pertama, nanti 28 hari lagi [injeksi kedua]," katanya.

Dengan vaksinasi itu, kata Triputro, diharapkan tidak ada lagi nakes yang terpapar Covid-19. "Nakes kan paling depan, teman-

teman ini langsung menghadapi pasien dan lain sebagainya. Kami harapkan mereka selain menggunakan protokol kesehatan, APD dan lain sebagainya harus di internal diberikan imunisasi supaya lebih tahan. Kami harap tidak ada lagi tenaga kesehatan yang harus terinfeksi," ungkap Triputro.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi menyebutkan sekitar 245 tenaga kesehatan lansia di Kota Jogja direncanakan menerima vaksinasi susulan. "Sementara itu dulu karena menyesuaikan jumlah vaksin yang diterima Dinkes Kota Jogja," katanya.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Bertu Murtiningsih, mengatakan lansia yang akan divaksin di DIY ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. "Nanti daerah memverifikasi," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, DIY memiliki proporsi penduduk lansia 14,5% atau terbanyak di Indonesia. Jika pada tahun yang sama total terdapat 3.842.932 penduduk, jumlah lansia di DIY setidaknya sekitar 557.225 penduduk. Jumlah ini lebih banyak dibanding jatah vaksinasi tahap kedua DIY pada pendataan awal dari Kementerian Kesehatan sebanyak 555.290 dosis.

Dalam vaksinasi juga akan dilakukan proses *screening* kesehatan yang akan memastikan kondisi kesehatan penerima vaksin memungkinkan untuk divaksinasi. Di setiap puskesmas kata dia, juga sudah memiliki data rekam medis lansia sehingga akan digunakan sebagai rujukan *screening*. "Setiap pelaksanaan vaksinasi ada prosedurnya. Ada empat meja yang harus dilalui. Nah, meja kedua adalah meja di mana peserta vaksinasi nanti akan di *screening* status kesehatannya," ujarnya.

Penambahan Pasien

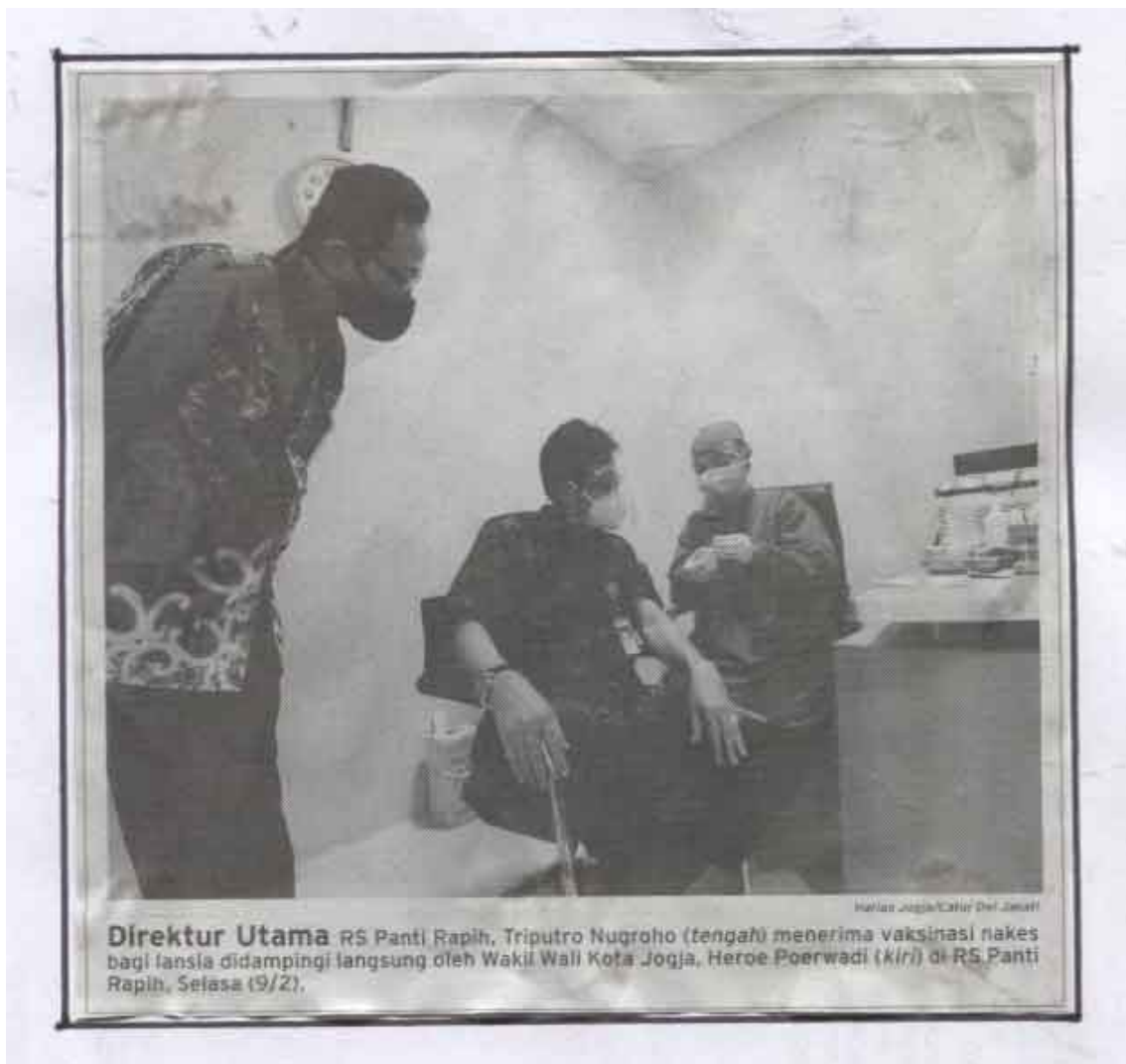
Sementara itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, pada Selasa, mengumumkan 228 penambahan kasus positif 326 kasus sembuh, dan empat kasus meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan pada 1.004 sampel dari 967 orang.

Berty Murtiningsih menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (57 kasus), Kulonprogo (57), Bantul (50), Sleman (40), dan Gunungkidul (24).

Kasus yang dilaporkan meninggal dunia meliputi Kasus 17.950, perempuan, 46, warga Kota Jogja; Kasus 21.717, laki-laki, 61; Kasus 23.079, laki-laki, 51, keduanya, warga Bantul; dan Kasus 23.689, laki-laki, 69, warga Sleman.

Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Sleman (169 kasus), Bantul (77), Kota Jogja (55), Gunungkidul (21), dan Kulonprogo (4). Dengan penambahan ini total kasus positif DIY menjadi 23.982 kasus, dengan rincian 6.055 kasus aktif, 17.370 kasus sembuh, dan 557 kasus meninggal dunia. (ABNU)

Hamid Rizki



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 15 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005